

B 31



PROGRAM STUDI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (S-2)  
DAN ILMU PENDIDIKAN (S-3)  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

# PROGRAM BOOK

## SEMINAR NASIONAL

### NASIONAL DALAM TANTANGAN

Universitas Negeri Yogyakarta,  
5 Oktober 2013



# EKSISTENSI SEKOLAH DALAM TANTANGAN GLOBAL

Siti Irene Astuti Dwiningrum  
 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta  
 ireneast@yahoo.com

## Abstrak

Globalisasi menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan sosial. Persoalan pendidikan semakin kompleks dalam tantangan global. Organisasi sekolah memiliki dinamika yang sangat variatif dalam merespon setiap bentuk perubahan masyarakat global. Adaptasi sekolah terhadap tantangan global sangat penting untuk mempertahankan eksistensi sekolah.

Eksistensi sekolah dihadapkan dengan berbagai isu dan kepentingan global yang memposisikan peran sekolah semakin termajinasikan. Padahal, eksistensi sekolah memiliki peran penting dalam membudayakan kehidupan manusia. Eksistensi sekolah harus terus diupayakan dalam menghadapi berbagai kepentingan global.

Pendidikan antisipatoris merupakan salah satu strategis yang harus dilakukan oleh sekolah dalam menjaga eksistensinya dalam menghadapi tantangan global. Dengan mengembangkan pendidikan antisipatoris, maka fungsi sekolah dalam menyiapkan anak-anak didik dalam menghadapi tantangan global akan lebih optimal, karena pendidikan antisipatoris memberikan bekal yang cukup bagi peserta didik untuk mengerjakan tugas kehidupan sebagai manusia yang lebih bermakna.

Key word : eksistensi sekolah, pendidikan antipatoris

## 1. Pendahuluan

Dalam memahami bagaimana sesungguhnya pendidikan dikelola masih menyisahkan persoalan yang rumit dan kompleks. Namun demikian dari analisis Jack L.Nelson dalam bukunya *Critical Issues in Education* secara garis besar dapat dipahami dengan jelas bahwa persoalan yang muncul dalam institusi pendidikan, seperti halnya menurunnya kualitas siswa, rendahnya tingkat kesejahteraan guru, mahalnya biaya pendidikan, minimnya sarana dan prasarana disekolah yang dikelola pemerintah, atau ada kepentingan sosial akibat tidak meratanya akses untuk mendapatkan pendidikan yang layak, menjadi area perdebatan yang terus berlangsung bersumber pada tiga masalah pokok. Dalam hal ini isu dan konflik yang berkembang adalah 1) perselisihan pendapat bagaimana seharusnya institusi pendidikan diarahkan atau dijalankan, 2) untuk kepentingan siapa lembaga-lembaga persekolahan diajukan, 3) apa yang seharusnya dikelola, muncul berbagai kelompok kepentingan didalam masyarakat (Nelson,1995). Berdasarkan tiga persoalan tersebut, eksistensi sekolah menarik untuk dikaji secara terus-menerus, karena organisasi sekolah memiliki dinamika yang sangat variatif dalam merespon setiap bentuk perubahan.

Sekolah sebagai lembaga paling legitimate mendapat ujian ketika dihadapkan pada realitas; banyak masyarakat yang tidak mampu memperoleh pengetahuan, gara-gara tidak sanggup memenuhi tuntutan yang ditawarkan sekolah. Kritikan terhadap sekolah yakni sekolah dinilai tidak memecahkan solusi tetapi membuat kesenjangan social yang semakin melebur. *Randall Collin* dalam bukunya *The Credential Society: An Historical Sociology Of Education And Stratification* (1979) menyatakan bahwa pendidikan formal merupakan babak-babak awal proses stratifikasi sosial. Pengetahuan diibaratkan komoditas akhirnya timbul kapitalisasi pengetahuan. Dunia pendidikan akhirnya lebih condong diperlukan sebagai 'perusahaan' yang cenderung mengabaikan mutu "inputnya" yang penting berani bayar mahal. Fenomena sosial tersebut yang memunculkan gejala komersialisasi pendidikan, akibat yang menyedihkan ketika dalam proses pendidikan mulai mengabaikan moralitas dan keluhuran nilai pendidikan. Tak heran jika eksistensi sekolah mulai banyak dikritisi oleh pakar pendidikan, khususnya dalam menganalisis peran sekolah dalam proses pembangunan pendidikan. Makalah ini akan membahas bagaimana pendidikan antisipatoris dikembangkan oleh sekolah dalam menghadapi tantangan global ?

## 2. Pembahasan

Eksistensi sekolah dihadapkan dengan berbagai isu dan kepentingan global yang memposisikan peran sekolah semakin termajinasikan. Dalam hal ini sekolah belum berhasil menjalankan perannya secara fungsional yang berdampak belum semua tujuan pendidikan dapat direalisasikan dalam membangun masyarakat yang berbudaya dan bermartabat. Disamping itu dunia pendidikan berhadapan dengan enam bahaya domestik yang mengancam ketahanan nasional seperti halnya masalah (Tilaar, 2003:20) antara lain : ketidakadilan dan kesewenang-kesewenangan, arogansi kekuasaan, arogansi kekayaan, dan arogansi intelektual, kebringasan social, perilaku sosial menyimpang, perubahan tata nilai, serta perubahan gaya hidup sosial. Jika persoalan domestik tidak dapat diselesaikan maka masyarakat akan mengalami disintegrasi sosial yang bisa berkembang menjadi disintegrasi bangsa, yang fenomena inipun sudah mulai berlangsung saat ini.

Disamping itu, bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang datang dari luar yakni ide-ide asing yang membahayakan identitas budaya bangsa. Sebagai akibatnya, bangsa Indonesia semakin sulit untuk melakukan pembangunan pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan di Indonesia harus diperjuangkan didalam sekolah dan keluarga serta masyarakat dalam menghadapi tantangan dari dalam maupun dari luar, khususnya dalam menghadapi tantangan global.

Dalam era globalisasi, eksistensi sekolah banyak dikritisi oleh berbagai pakar pendidikan. Beberapa kritikan yang dilontarkan para pakar tersebut memberikan gambaran yang lebih empirik bahwa eksistensi sekolah telah menunjukkan ragam fungsi dan perkembangannya sebagai media untuk membudayakan kehidupan manusia. Bagi Ivan Illich (1970) , hukum memaksa semua orang untuk sekolah, meskipun banyak ketimpangan mulai dari isi sampai pada wilayah biaya. Sekolah menjadi ritus masyarakat yang membodohkan, dibayangkan hanya aktivitas monoton biaya bisa sampai dengan puluhan juta. Sekolah menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan, karena masyarakat yang mampu sekolah adalah masyarakat yang tidak miskin. Efek negatif sekolah yang terjadi saat ini adalah kuatnya

perbisnisan sekolah yang mengakibatkan banyak orang termajinkan. Sistem yang kemudian tercipta adalah yang mampu bayar yang dapat sekolah. Kesewenang-wenangan dalam menerapkan kebijakan memicu terjadinya gesekan-gesekan sosial dan berimbas pada sistem relasi social. Bentuk-bentuk marginalisasi terhadap orang miskin adalah kekerasan, yang tidak bisa ditolelir, strategi rapi untuk mengomersilkan pendidikan demi menanggapi keuntungan adalah strategi neoliberalisme. Kritikan Illich terhadap sekolah, bahwa sekolah lebih menitikberatkan produknya, yang berupa lulusan yang mengejar sekolah mengaburkan makna belajar; guru dalam prakteknya lebih memerankan dirinya sebagai hakim, pengajar idiologi sekolah tidak mengembangkan kegiatan belajar dan atau mengajarkan keadilan, sebab para pendidik lebih menekankan pengajaran sudah dipaket-paketkan dengan spesifikasi. Di sekolah kegiatan belajar dan penentuan sosial dilebur menjadi satu. Lebih lanjut, Illich menguraikan bahwasanya sekolah melupakan koridornya sebagai tempat untuk mengenyam pendidikan yang beresensi memanusiakan manusia, dan bukan sebagai tempat pendoktrian dan pengabdian beberapa unsur kemanusiaan dari siswa.

Sementara bagi Freire, tokoh pendidik asal Brazil, berpendapat bahwa sekolah-sekolah yang bersifat normal merupakan tempat penindasan bagi para peserta didik. Hal itu diakibatkan karena kewajiban yang sangat memberatkan harus dijalankan oleh para peserta didik, salah satunya adalah sistem pembelajaran yang bergaya bank (*Banking Concept of Education*). Sekolah saat ini cenderung mengalami proses kapitalisme pendidikan. Bagi para pemilik modal besar, sekolah merupakan lahan subur untuk mendatangkan laba tinggi, yang kemudian ditandai dengan kecenderungan mendirikan bangunan sekolah yang serba modern dan canggih untuk menarik konsumen. Konsekuensi membayar mahal. Tak heran jika Freire menyatakan bahwa sekolah merupakan sosok kapitalis yang licik (dalam Edukasi 2005). Analisis Freire membuktikan semakin eksisnya sekolah elite dalam tatanan masyarakat global. Pada akhirnya, kapitalisasi pendidikan juga menjadi fenomena sosial yang semakin kuat.

Kritikan Bordieu yang mempersepsikan bahwa peran sentral sekolah adalah memproduksi berbagai ketidakmerataan sosial

dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sekolah adalah faktor dalam konsensus budaya, sejauh ia mempresentasikan kebahagiaan *common sense* yang merupakan prasyarat komunikasi. Boudieu menunjukkan sistem pendidikan yang diterima di sekolah bekerja untuk mempertahankan tatanan sosial ditengah-tengah semua yang potensial untuk konflik. Sistem pendidikan memberikan sebuah kesempatan melalui sumbangannya pada reproduksi sistem hubungan kelas yang mana hubungan antar kelas dan bentuk-bentuk linguistik prestise, pendidikan yang diterima di sekolah. Dalam perspektif kekuasaan adalah mendominasi kelompok yang tidak beruntung disebut sebagai kekuatan simbolik. Kekuasaan untuk melaksanakan prinsip-prinsip konstruksi realitas ini, khususnya realitas sosial dipandang sebagai dimensi utama kekuatan politik. Kepemilikan modal simbolik mempertahankan produktivitas modal pendidikan yang diperoleh pada modal pendidikan merupakan sebuah fungsi modal ekonomi dan sosial yang dapat disediakan untuk mengeksploitasinya. Analisis Bordieu, menguatkan eksistensi sekolah sebagai salah kekuatan yang strategis dalam membangun kekuatan kelas-kelas sosial yang akan menguatkan adanya dominasi kelas sosial dalam struktur sosial semakin langgeng.

Dari berbagai kritikan terhadap sekolah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka makna sekolah perlu dikritisi eksistensinya. Dalam konteks inilah sekolah perlu dikembalikan pada maknanya yakni dalam budaya kita dinamakan dengan lembaga pendidikan. Dalam hal ini pendidikan diartikan sebagai *educare* (membawa keluar, mendewasakan anti formalitas, *Educare* juga berarti memimpin atau menuntun. Filosofi pendidikan sebagai *educare* ini lebih mengutamakan proses pendidikan yang tidak terjebak pada banyaknya materi yang dipaksakan kepada para peserta didik dan harus dikuasai. Proses pendidikan *educare* lebih merupakan aktivitas hidup untuk menyertai, mengantar, membimbing, mendampingi. memungkinkan peserta didik sehingga tumbuh dan berkembang. Adapun perbedaan sekolah dan pendidikan adalah bahwa pendidikan merupakan pola interaksi manusiawi antara orang perseorangan dengan dunia diluar dirinya sebagaimana terjadi dalam keluarga dan masyarakat. Pendidikan sebagai proses aktualisasi potensi diri, juga tidak bisa dibeli, tidak bisa diprediksi, dikontrol sebagaimana proses produksi barang

dan jasa. Perbedaan pendidikan dan pengajaran adalah sebuah batas yang sangat jauh, berbicara pada pendidikan maka akan lebih mengarah pengembangan kepribadian, sedangkan sekolah lebih mengarah pada wilayah pengajaran. Sedangkan Ki Hadjar Dewantara memaknai pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan berarti memelihara hidup-tumbuh ke arah kemajuan, tidak boleh melanjutkan keadaan kemarin menurut alam kemarin. Pendidikan adalah usaha kebudayaan, berazas keadaban yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan (Dwi Siswoyo,2013).

Upaya untuk mengembalikan tujuan pendidikan tidak mudah karena sistem pendidikan tak lepas dari kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah. Sebagai contohnya, pendidikan sentral mendapat kritikan cukup tajam. Salah satu kritikan ditujukan pada jenis standar yang digunakan dinilai sebagai upaya untuk melaksanakan dan mengokohkan sistem pemerintahan dimana segala sesuatu ditentukan oleh kekuasaan Negara dan ditopang oleh birokrasi yang kaku, peraturan-peraturan terpusat dan tidak memberikan kebebasan didaerah untuk melaksanakan peraturan-peraturan sesuai dengan kebutuhan daerah. Hal tersebut juga didukung dengan kenyataan bahwa sistem pendidikan sentralistik seperti mesin besar yang digerakkan dari pusat dan lembaga-lembaga pendidikan didaerah merupakan sekumpulan sekumpulan kecil yang berputar sesuai dengan keinginan pemerintah pusat. Lebih dari semua itu, proses pendidikan yang demikian hasilnya adalah pembodohan rakyat (*stupidifikasi*). Lebih jauh lagi, proses komodifikasi pendidikan memunculkan kapitalisme pendidikan karena pendidikan tidak diarahkan kepada kebutuhan rakyat, tetapi kebutuhan segelintir kelompok elit. Dalam hal ini, kapitalisasi pendidikan lebih kuat perannya dibandingkan dengan pendidikan yang populis.

Kapitalisasi pendidikan menjadi fenomena sosial yang terus berkembang dalam masyarakat global. Kapitalisasi pendidikan telah mengubah peran pendidikan nasional. Peran sosial pendidikan bergeser ke peran industri dan jasa. Liberalisasi pendidikan

mengurangi peluang dan kesempatan rakyat untuk memperoleh hak pendidikan untuk bersekolah yang menjadi tanggung jawab Negara. Kapitalisasi pendidikan masuk dalam semua level pendidikan nasional sebagai contohnya dengan disyahkan UU BHP yang cenderung mengembangkan nilai-nilai yang berorientasi pada penumpukan modal dan pengembangan modal yang dipertahankan dalam iklim globalisasi yang berkembang tidak adil karena monopolistik atas kekuasaan pasar. Pada akhirnya, kecenderungan pendidikan nasional di era globalisasi telah meminggirkan nilai kemanusiaan yang hakiki (Dwiningrum, 2013)

Substansi pendidikan yang bertujuan untuk memajukan tingkat kebudayaan manusia dan peradaban manusia terus menghadapi tantangan. Praktek pendidikan nasional yang berkembang dalam iklim kapitalisme yang monopolistik telah memarjinalkan eksistensi pendidikan untuk rakyat. Komersialisasi dan privatisasi pendidikan dalam prakteknya telah memberikan kebebasan dalam pengelolaan keuangan institusi pendidikan yang dilakukan secara otonomi, sehingga pemerintah cenderung tidak campur tangan lagi dan peran investor semakin kuat. Sebagai konsekuensinya rakyat yang hendak menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, akan mengurungkan niatnya, karena biaya pendidikan sangat mahal. Di sisi lain, kurikulum yang dirancang untuk mengembangkan potensi manusia secara optimal tetapi cenderung diorientasikan untuk memenuhi tuntutan pasar global (Dwiningrum, 2013). Keadaan tersebut juga mengubah kurikulum sebagai bagian proses dari perubahan kebijakan pemerintah dalam menghadapi tuntutan globalisasi.

Realitas sosial tersebut membuktikan bahwa pembangun pendidikan menjadi bagian isu politik yang dalam perkembangannya menggambarkan adanya kecenderungan bahwa pendidikan dan politik tidak dapat dipisahkan. Analisis yang terkait dengan hubungan tersebut yakni adanya kecenderungan bahwa masalah dana pendidikan menjadi keputusan politik; perubahan kebijakan pendidikan menjadi masalah nasional; masalah pendidikan menjadi isu politik; keputusan politik pemerintah cenderung untuk perbaikan kualitas pendidikan anak. Dalam konteks inilah pembangunan pendidikan di Indonesia

cenderung mendominasi dari salah satu kecenderungan tersebut, yang pada akhirnya akan juga berpengaruh pada struktur dan mekanisme organisasi di sekolah-sekolah.

Sebagai contohnya, dalam organisasi sekolah standar mutu merupakan aspek penting dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Dalam hal ini standar sebagai sarana pengendalian mutu, yaitu ukuran-ukuran untuk mengetahui atau mengontrol kualitas pendidikan tak lepas dari kepentingan politik. Kualitas pendidikan tak lepas dari berbagai standar yang ditentukan oleh pemerintah yang berkuasa. Secara umum penentuan standar yang dilakukan dengan berbagai cara. Menurut Diane Ravitch (1995) terdiri tiga jenis standar yaitu: a). Standar isi; b) Standar penguasaan; c). Standar sumber-sumber belajar. Sedangkan secara operasional, perkembangan penyusunan kurikulum dapat digolongkan kepada tiga desain, yaitu 1) yang berpusat kepada mata pelajaran (*subject matter*); 2). Yang berpusat kepada pembelajar (*leaner centered*); 3). Berpusat kepada masalah (*problem centered*). Dalam prakteknya pelaksanaan standarisasi tersebut tidak mudah untuk diaplikasikan, bahkan ada kecenderungan setiap negara memiliki patokan yang tidak sama. Bagi Indonesia yang sudah memiliki ketentuan standar pendidikan nasional sebagaimana ditentukan oleh BSNP, tetapi hasil standarisasi pendidikan dalam sistem yang desentralistik masih menjadi perdebatan konsep karena standarisasi dalam aplikasinya masih dilematis antara ukuran pada standar nasional atau standar lokal. Perdebatan inilah membawa implikasi bahwa standar mutu pendidikan antar pemerintah daerahpun menggambarkan hasil yang beragam dari kualitas pendidikan.

Secara lebih khusus lagi jika dikaitkan sekolah yang bertanggung jawab pada penerapan kurikulum sekolah menghasilkan signifikansinya. Sebagai contohnya, kurikulum sebagai sarana dari standar yang diinginkan dan ditentukan oleh negara tidak selalu mampu diterapkan secara optimal oleh sekolah. Hal ini dikarenakan penyusunan kurikulum meminta pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan teknis agar dalam kurikulum tidak tersembunyi apa yang disebut *the hidden curriculum*, yaitu unsur-unsur kekuasaan yang tidak kelihatan dari negara yang memasuki sistem pendidikan nasional. Di sinilah sumber konflik sangat mungkin terjadi jika terjadi penyimpangan

atau kesenjangan antara kurikulum nasional dan kurikulum yang diterapkan di sekolah. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, dalam proses perkembangannya untuk mencapai standar yang tinggi serta kurikulum yang didesain dalam perspektif baru tampaknya akan berhadapan dengan bahaya yang sedang menimpa dunia pendidikan, yakni perkembangan neoliberalisme dan neokonservatisme yang semakin kuat.

Dunia pendidikan juga berhadapan dengan kepentingan global. Efek yang terjadi dengan melemahnya peranan kekuasaan negara dalam pendidikan, maka pendidikan cenderung oleh budaya corporate. Budaya organisasi merupakan sumber, kekuasaan di dunia yang mengglobal yang semakin menghilangkan kekuasaan negara. Dalam konteks inilah pendidikan tidak hanya terbatas pada isu sentralistik dan desentralistik, tetapi juga menjadi isu global. Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan kesadaran kritis dimana tanggung jawab pendidikan adalah menjadi tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi dalam memperjuangkan pendidikan sebagai hak warga, hal ini sesuai dengan isu tentang *education for all* yang dalam prakteknya semakin sulit dicapai dalam tantangan masyarakat global.

Pendidikan untuk semua belum dapat diterapkan secara maksimal. Kebijakan wajib belajar merupakan salah satu upaya untuk merespon isu global yang terkait dengan pendidikan untuk semua. Namun demikian, implementasi kebijakan wajib belajar di Indonesia masih menghadapi dua kendala pokok yakni kendala struktural dan kultural. Kendala struktural ditunjukkan dengan belum meratanya kesempatan pendidikan bagi semua masyarakat untuk belajar dalam semua level pendidikan. Bahkan struktur sosial masih menggambarkan kesenjangan sosial-ekonomi yang menjadi salah satu sumber ketimpangan pendidikan yang hampir terjadi pada semua level pendidikan. Padahal, semua warga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, khususnya pendidikan dasar yang sudah dibangun oleh kekuatan landasan hukum yang kuat yakni sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar, yang pada intinya memiliki ketentuan umum bahwa wajib belajar adalah program pemerintah pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara

Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian halnya, penjaminan wajib belajar sudah dirancang dengan detail yang pada intinya pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya; Warga negara Indonesia yang berusia enam tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan; Warga negara Indonesia yang berusia di atas 15 tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; Warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya sesuai peraturan perundang-undangan (Sairin, 2012:143-144). Dalam hal ini, proses pelaksanaan kebijakan pendidikan sesungguhnya secara obyektif tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus dianalisis dalam tatanan implementasinya dengan memperhatikan dimensi program, proses, dan evaluasinya. Karena, kebijakan pendidikan tentang wajib belajar tidak cukup dengan diatur oleh UU dan PP tetapi yang terpenting adalah kesiapan sumber daya manusia yang mampu mengelola pendidikan dasar secara profesional, dan juga membangun kesadaran masyarakat untuk merealisasikan hak pendidikan oleh pemerintah pusat dan daerah (Dwiningrum, 2013).

Dalam perspektif pendidikan kritis yang mempresentasikan gugatan terhadap dunia pendidikan yang dinilai gagal melahirkan peserta didik yang kompeten, baik dari segi keilmuan, keahlian, keterampilan, dan keahlian baik untuk kehidupan individual maupun dalam kaitannya dengan kehidupan kemasyarakatannya. Kegagalan peran pendidikan dalam pemikiran Ivan Illich atau Paulo Freire bersumber oleh banyak hal, sebagaimana dijelaskan oleh Illich bahwa

pendidikan modern dalam proses pendidikannya telah menghasilkan "dehumanisasi" dan kelembagaan pendidikan di negara-negara berkembang tidak akan membawa perubahan apa-apa sehingga sistem pendidikan hanya akan memperkuat struktur kelompok elit yang mapan. Oleh karena itu, Illich menyarankan sistem persekolahan harus dihapuskan (Illich, 1979 dalam Azra, 2003: 149). Kritik pun dikemukakan oleh Freire yang menyatakan bahwa pendidikan yang seharusnya mampu membebaskan manusia dari keterbelakangan dan kobodohan ternyata hanya mampu menjadi alat penindasan bagi kekuasaan. Sementara itu, *Everett Reimer* dalam artikel : *School Is Dead!* menyatakan bahwa sekolah bagi kebanyakan orang adalah institusi untuk mendukung hak-hak istimewa; dan pada waktu yang sama merupakan instrument bersama untuk mobilitas vertical. Bagaimana sesungguhnya sekolah dikelola dalam menghadapi tantangan global? Adalah pertanyaan yang terus berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

### 3. Tantangan Sekolah di Era Global

Problematis yang terjadi dalam dunia pendidikan ada dalam tataran makro dan mikro. Pada tataran makro dihadapkan pada tuntutan global yang menjadikan peran pendidikan harus menampilkan wajah yang kompetitif dengan didukung oleh nilai-nilai global yang dominant. Sementara dalam tataran mikro, institusi pendidikan dianggap "gagal" dalam menjadikan individu yang berkarakter dan berbudaya. Kekuatan ideologi neoliberal dalam globalisasi menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan atau komoditas dan dikomersilkan. Faham, neoliberal dimana negara memberikan kesempatan kepada swasta untuk menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi keuntungan menjadikan pendidikanpun berkembang sebagai "industri pendidikan: yang terus berkembang secara kompetitif. Kebijakan privatisasi menjadi paradigma yang terus dikembangkan dalam, mengantisipasi tuntutan global. Pandangan neoliberal sangat pragmatis dan ekonomi deterministik. Siswa adalah bagian dari modal yang harus dibekali dengan kemampuan untuk bersaing secara efektif dan efisien karena dunia sangat kompetitif secara ekonomi. Kebijakan neoliberal menunjukkan adanya keperpihakan pada mekanisme pasar.

Privatisasi pendidikan terus berkembang dengan masuknya korporasi dalam pengelolaan dunia pendidikan. Kuatnya pengaruh neoliberal dalam kebijakan pendidikan menjadikan diskriminasi pendidikan semakin kuat, dan peran negara semakin melemah serta "profit oriented" menjadi tujuan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Kecenderungan inipun diperkuat dengan penggunaan ISO dalam dunia industri pendidikan yakni label IB (*International Baccalaureate*) untuk pengelola program sekolah bertaraf internasional menjadi trend dalam pengelolaan pendidikan. Budaya global dan cepatnya penyebaran teknologi yang terpaket dengan struktur manajemen perusahaan baru menekan lembaga-lembaga pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan itu dan selanjutnya menjajah pendidikan dengan kekuatan bisnis.

Sementara ini pendidikan nasional belum mampu meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan anak didik, tetapi juga dalam membentuk karakter dan kepribadian (*nation and character building*) yang sangat diperlukan untuk menuju rekonstruksi negara dan bangsa. Padahal, pendidikan nasional merupakan sarana paling strategic untuk mengasuh, membesarkan dan mengembangkan warga, negara yang demokratis dan memiliki keadaban. Reformasi di bidang pendidikan perlu dilakukan seiring dengan perubahan fenomena ekonomi dan politik global yang sangat membutuhkan respon yang proaktif bagi dunia pendidikan. Bagaimanapun, globalisasi sebagai konstruksi teoritis yang bersifat kontradiktif jangan dibiarkan membawa kehancuran tradisi lokal terwasuk didalamnya upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Mengkritisi dunia pendidikan dapat dilihat dari dua dimensi yakni dimensi internal maupun eksternal, pertama dimensi internal berkaitan dengan dunia pendidikan itu sendiri, kelembagaan, kandungan atau muatan pendidikan, dan terakhir, proses-proses pendidikan yang berlangsung di dalamnya. Kedua, dimensi eksternal, yang berkaitan dengan kondisi di luar pendidikan yang justru mempengaruhi dunia pendidikan secara keseluruhan. Membangun pendidikan yang berkarakter adalah sebuah tantangan baik bagi keluarga, sekolah dan masyarakat. Hal ini dapat dimaknai bahwa pendidikan antara ketiga institusi tersebut harus dikuatkan kembali. Pilar pendidikan harus dibangun

dikuatkan kembali antara keluarga, sekolah dan masyarakat. Prinsip *educational networks* yang nyaris terputus harus dijalin secara sinergis. Keluarga sebagai pilar pokok menjadi tempat pertama anak untuk tumbuh dan berkembang harus menjadikan *school of love*, sekolah untuk kasih sayang bagi setiap anak. Sedangkan peran sekolah tidak sekedar sebagai *transfer of knowledge*, dimana guru hanya menyampaikan pengetahuan melalui berbagai mata pelajaran, tetapi juga sebagai lembaga yang mangusahakan usaha dan proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai (*value-oriented enterprise*).

Pendidikan yang berorientasi pada nilai merupakan proses pendidikan karakter. Proses pendidikan karakter dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, *pertama* dengan pendekatan *modelling*, yakni mensosialisasikan dan membiasakan lingkungan sekolah untuk menghidupkan nilai-nilai akhlak dan moral yang benar melalui model atau teladan, *kedua*, melakukan pembiasaan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan tentang nilai-nilai yang baik dan yang buruk yang akan dijadikan pedoman sikap dan perilaku. Usaha ini diiringi dengan langkah-langkah memberi penghargaan, menumbuhkan nilai-nilai baik, dan sebaliknya mengecam dan mencegah berlakunya nilai-nilai yang buruk; menegaskan nilai-nilai yang baik dan buruk secara terbuka dan kontinue; memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih berbagai alternatif sikap dan tindakan berdasarkan nilai; melakukan pilihan secara bebas setelah menimbang dalam-dalam berbagai konsekuensi dari setiap pilihan dan tindakan membiasakan bersikap dan berprinsip baik; membiasakan bersikap dan bertindak dengan pola-pola yang baik yang diulangi secara terus menerus.

Di samping itu, perlindungan terhadap pendidikan dalam tantangan global dengan berkembangnya paham neoliberalisme dan neokonservatisme. Paham neoliberalisme menekankan kepada kekuasaan negara yang lemah, segala sesuatu dipulangkan kepada hak privat, dan mengurangi campur tangan kekuasaan negara. Paham neokonservatisme menginginkan adanya negara yang kuat dan segala sesuatu dikembalikan kepada publik. Dari berbagai kajian menunjukkan bahwa liberalisme dan globalisasi mempunyai tendensi untuk memperlemah kekuasaan negara. Akibatnya, dalam dunia pendidikan terdapat empat kecenderungan, yaitu: 1). Sistem

pendidikan mengacu kepada esistem ekonomi pasar bebas, artinya memberikan tempat yang seluas-luasnya kepada pasar atau kekuatan pasar; 2) Nilai-nilai dalam masyarakat seperti adat-istiadat, keluarga, menjadi lemah disertai pula oleh semakin merosotnya patriotisme; 3). Terlalu menekankan kepada standar untuk mempertajam daya kompetitif agar dapat bersaing di pasar bebas; 4). Pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan industri.

Perbedaan dalam wacana kehidupan bernegara inilah yang seringkali menjadi sumber konflik kepentingan negara dalam mengatur kebijakan pemerintah dalam menangani masalah dan rencana pendidikan, sehingga praktek-praktek penyelenggaraan pendidikan seringkali mengalami penyimpangan-penyimpangan yang berdampak tujuan pendidikan belum tercapai secara optimal. Hal inilah yang mendorong berbagai kebijakan dan praktik pendidikan perlu direformasi untuk mengembalikan peran pendidikan pada fungsi utamanya sebagai lembaga yang mampu mengantarkan dan mengembangkan potensi manusia mencapai tingkat kemandirian tertentu, sehingga di dapat dinamakan individu. Sebagaimana dikatakan oleh Kleden bahwa pendidikan bukan usaha untuk menciptakan alat atau instrument, bukan pula menciptakan instrument untuk pasar dan untuk negara. Akan tetapi, pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah diarahkan untuk membangun watak emansipatoris yang lebih kuat dibandingkan dengan watak instrumental.

Pendidikan saat ini perlu didesain untuk mempersiapkan anak didik dalam menghadapi kehidupan. Pendidikan perlu dirancang tidak hanya terbatas pada mempersiapkan seseorang untuk suatu profesi tertentu, tetapi juga membekali anak didik dengan kemampuan dalam menyelesaikan berbagai masalah. Hasil pendidikan diharapkan tuampu mengatasi tiga tugas kehidupan yaitu tugas untuk dapat hidup (*to make living*); tugas untuk mengembangkan kehidupan yang bermakna (*to lead a meaningful life*); tugas turut memuliakan kehidupan (*to ennoble life*). Dengan pendidikan yang antisipatoris diharapkan peserta didik memiliki kemampuan adapatif dalam menghadapi tantangan global (Buchori,2001).

Sekolah harus mampu mempersiapkan para siswa untuk menjalani kehidupan perlu dilakukan disemua jenjang pendidikan yakni



pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Sekolah harus mengajarkan makna hidup, tetapi yang sering ditekankan adalah tentang "keberhasilan hidup". Kehidupan yang bermakna adalah masalah pribadi sebagai hasil dari pengenalan diri sendiri, dan pengetahuan bagaimana menyatakan jati diri secara berarti dalam berbagai lingkungan kehidupannya. Untuk membimbing anak memahami kehidupan bermakna perlu mengembangkan *personalized education* melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan antisipatoris mengajarkan kemampuan makna. Sebagaimana dijelaskan oleh Philip H. Phouix yang menekankan pentingnya mengajarkan kemampuan makna.

Pengetahuan yang tidak bermakna (*meaningless knowledge*) tidak ada gunanya, dan hanya menjadi beban hidup. Sebaliknya, pengetahuan yang bermakna (*meaningful knowledge*) merupakan sesuatu yang bersifat fungsional, dan berguna dalam kehidupan. Kehidupan modern yang penuh dengan berbagai ketimpangan, pertentangan, dan kemajuan, dapat membuat manusia kehilangan maknanya dalam hidup. Untuk itulah diperlukan suatu program pendidikan umum yang memberikan kemampuan kepada para siswa untuk menangkap berbagai jenis makna yang terdapat dalam kehidupan (Buchori, 2001). Dalam kehidupan terdapat enam jenis wilayah makna sebagai berikut:

Tabel 1.

Wilayah	Deskripsi
Symbolic	Untuk memberikan makna simbol harus diberikan pendidikan dalam bahasa matematika
Emperies	Untuk berbagai makna yang terdapat di wilayah emperies harus diberikan pendidikan tentang lingkungan fisik (fisika, kimia, biologi, lingkungan sosial, dan budaya).
Esthetics	Untuk memberikan kemampuan makna dalam wilayah esthetics, biasanya diajarkan seni suara, sastra, visual arts, dan seni gerak ( <i>the art of movement</i> ).
Synnoeties	Untuk memahami kemampuan makna dalam wilayah synnoeties ( <i>personal knowledge atau intersubjective understanding</i> ).
Ethics	Untuk memahami makna yang terletak pada wilayah ethics, perlu ditanamkan kesadaran untuk menghormati dan mematuhi secara sukarela norma-norma yang ada ( <i>voluntary personal commitmen to values</i> ).
Synopties	Untuk memahami makna yang terdapat dalam wilayah synopties, mata pelajaran yang harus diajarkan adalah sejarah, filsafat dan agama

Dengan memahami jenis wilayah makna dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran dalam setiap pelajaran mempunyai kontribusi dalam membangun kesadaran makna pada peserta didik. Oleh karena, pendidikan harusnya mengembangkan keenam jenis wilayah makna secara seimbang. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik secara bertahap mampu menangkap makna apa yang terlibat dalam semua proses kehidupan yang dijalaninya, yakni menangkap makna kehidupan itu sendiri. Persoalannya, materi dan strategi pembelajarannya belum mampu menyentuh semua dimensi maknanya secara holistik, sehingga peserta didik belum mampu kesadaran makna kehidupan secara utuh. Dalam hal ini, pendidikan antisipatoris tidak cukup ditentukan oleh substansi materinya, tetapi lebih penting adalah proses

pembelajarannya yang diharapkan mampu mengubah tata nilai peserta didik. Untuk tercapai semua tujuan tersebut diperlukan nilai yang mampu mengubah setiap perilaku yang sesuai dengan perubahan yang terus terjadi.

Namun demikian, perubahan tata nilai dalam semua level kehidupan tidak mudah dilakukan. Kehidupan menjadi sulit diatasi jika terjadi perubahan nilai dalam semua level (Buchori, 2003): a) Pembaruan tata nilai pribadi (*personal value system*), terkait dengan kemampuan memahami nilai-nilai apa saja yang dijunjung tinggi dalam kehidupan pribadi. b) Pembaruan tata nilai kelompok (*group value system*), perlu dikaji nilai-nilai yang disepakati bersama dalam kehidupan kelompok; c) Pembaruan tata nilai bangsa (*national value system*), perlu mengkaji ulang nilai-nilai yang dijadikan sebagai landasan

dari kehidupan national, berbangsa dan bernegara

Proses perubahan tata nilai tidak mudah. Proses perubahan tata nilai cenderung terjadi kesenjangan yang terus terjadi antara tata nilai yang tertulis dalam teks (*textual values system*), dengan tata nilai yang benar-benar ditaati dalam kehidupan sehari-hari (*actual value system*). Ketimpangan antara kedua nilai ini jika tidak diminalkan akan menjadi sumber dari berbagai perilaku sosial yang merugikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti halnya : perilaku munafik, perilaku hipokrit dll. Dalam hal ini sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan perubahan tata nilai, sehingga pendidikan dapat dijadikan sebagai sebuah kekuatan kultural yang turut membentuk masa depan bangsa; bahwa pendidikan bukan menjadi instrument mati, tetapi pendidikan pada instansi terakhir sebagai ekspresi dari hati nurani bangsa. Dalam konteks inilah, peran sekolah khususnya dalam tantangan global harus menjadi *agent of change* dalam mengembangkan aktivitas belajar kedalam semua wilayah makna untuk dapat dikembangkan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Diskusi tentang peran sekolah dalam tantangan global masih belum akhir, karena kajian ini masih menjadi pekerjaan para pendidik dan pengambil kebijakan di bidang pendidikan bahwa membangun proses pendidikan yang bermakna yang harus diletakkan dalam pilar keluarga , sekolah dan masyarakat secara sinergis , sehingga eksistensi pendidikan dalam era globalisasi tetap menjadi kekuatan untuk membudayakan kehidupan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik.

#### 4. Kesimpulan

Globalisasi telah menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan sosial. Berbagai persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan untuk tetap mempertahankan peran utamanya. Eksistensi sekolah dalam mempertahankan tujuannya dihadapkan pada berbagai kepentingan politik yang memarginalkan fungsi dan peran pendidikan.

Dunia pendidikan menghadapi dua masalah yakni dalam tataran makro dan mikro. Pada tataran makro dihadapkan pada tuntutan global yang menjadikan peran pendidikan harus menampilkan wajah yang kompetitif dengan didukung oleh nilai-nilai

global yang dominan. Sementara dalam tataran mikro, institusi pendidikan dianggap "gagal" dalam menjadikan individu yang berkarakter dan berbudaya. Persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan telah melemahkan eksistensi sekolah jika sekolah tidak mampu merespon tuntutan global.

Pendidikan antisipatoris merupakan salah satu strategis yang dapat dikembangkan oleh sekolah dengan mengembangkan kemampuan makna pada peserta didik. Pendidikan antisipatoris memerlukan perhatian sekolah untuk mengembangkan enam wilayah makna secara komprehensif dan sinergis agar berhasil secara maksimal. Pendidikan antisipatoris juga memerlukan perubahan tata nilai dalam semua level yakni level personal, level kelompok dan level bangsa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Efendi (2004), "*Meruntuhkan Kekuasaan Sekolah Atas Pengetahuan*", EDUKASI, Volume II, Nomer 2, Desember 2004, Halaman 205.
- Buchori, Muchtar (2001). *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti (2013), *Kapitalis Pendidikan VS Pendidikan: Pendekatan Kultural dan Modal Sosial Dalam Membangun Masyarakat Terdidik*. Yogyakarta: Penerbit Ash-Shaff.
- Collins, Eandall (1979), *The Credential Society An Historical Sociology of Education adn Stratification*, New York: American Press.
- Fauzok (2005), "*Mengembalikan Fungsi Sekolah Menuju Human Welfare*", EDUKASI, Volume II, Nomer 2, Desember 2004, Halaman 205.
- Illich, Ivan (1970), *Descholling*, Mexico: CIDOC
- Nelson, Jack L., Keneth Carlson, Stuart Palonsky (1996), *Critical Issues in Education, A Dialectic Approach*, United State: McGraw-Hill Companiers.
- Ravitchm, Diane (1995), *National Standards in American Education: A Citizen's Guide*, Brooking Instituion press.
- Reimer , Everett (2007), *School Is Dead* , University of California
- Tilaar (2003), *Kekuasaan dan Pendidikan*, Magelang: INDONESIAITERA.